

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi dimana kehidupan masyarakat semakin kompleks, dalam hal ini organisasi sektor publik semakin banyak memperoleh tekanan untuk selalu memperbaiki kinerjanya. Dengan adanya otonomi daerah (sesuai amanat UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004), maka memberi dampak bagi Pemda dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Untuk melakukan aktivitas pelayanan, pengaturan, pembinaan, koordinasi dan pembangunan dalam berbagai bidang (Tunti, 2013).

Hingga saat ini, banyak sekali masalah yang berhubungan dengan kinerja instansi pemerintah menjadi topik yang tiada habisnya. Masalah yang paling banyak timbul mengenai tindakan KKN yang melibatkan aparat didalamnya. Selain itu, masalah kualitas pendidikan yang masih rendah, disiplin kerja yang masih rendah, adanya tindakan penyimpangan administrasi, serta sumber daya aparatur yang dinilai belum profesional membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah. Dengan berbagai masalah tersebut, maka perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan harus terus dilakukan.

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pelayanan mereka kepada masyarakat. Adanya UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan

negara, yang diperkuat dengan PP No 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa dalam pelaporan keuangan harus disertakan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan (Aisyah, et al. 2014).

Tujuan utama sektor publik adalah pemberian pelayanan publik (*public service*) bukan hanya untuk memaksimalkan laba. Berkenaan dengan hal ini, maka pemerintah daerah harus mampu merespon berbagai inspirasi, tuntutan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Organisasi sektor publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang mampu membantu kebutuhan masyarakat luas (Bastian, 2006).

Menurut Pratiwi (2011) kinerja pemerintahan yang buruk dapat diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kegagalan pemerintahan dalam melakukan pemantauan dan penentuan perencanaan strategis. Pemantauan dan penentuan strategi strategis harus dijalankan oleh pemerintah daerah supaya dapat memperkecil resiko-resiko sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal dan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat luas. Faktor lain penyebab buruknya kinerja perusahaan secara umum adalah penyimpangan terhadap etika bisnis. Pendapat BPKP (2003) dalam Sayidah (2007) menyatakan bahwa perusahaan yang menerapkan praktek *good corporate governance* telah berupaya meminimalkan risiko keputusan yang salah atau yang menguntungkan diri

sendiri, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan yang pada akhirnya memaksimalkan nilai perusahaan.

Baik buruknya kinerja para aparatur pemerintahan dapat ditentukan oleh beberapa faktor, namun faktor yang dijadikan pertimbangan ada tiga faktor yaitu penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa empat faktor *good corporate governance* yang meliputi akuntabilitas, transparansi, keadilan dan partisipasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Ambarwati, et al. 2013).

Arens, et al. (2008) dalam Gozali (2012) menyimpulkan baik buruknya *good corporate governance* perusahaan di Indonesia memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pengendalian intern pada perusahaan tersebut. Lingkungan pengendalian merupakan kondisi obyektif yang ada pada organisasi, karena sangat mendasarnya komponen lingkungan pengendalian sebagai aspek pengendalian intern maka penerapan *good corporate governance* sangat besar kaitannya dengan kinerja perusahaan. Kondisi ini ditentukan oleh pimpinan organisasi, di mana lingkungan pengendalian meliputi nilai integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan pengawas, filosofi manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dan kebijaksanaan dan praktik sumber daya manusia.

Faktor kedua adalah komitmen organisasi, Tugiman (2000) dalam Taufik dan Kemala (2013) menyatakan bahwa untuk menciptakan *good*

corporate governance dalam institusi tidak lepas dari adanya komitmen. Selain itu komitmen yang tinggi akan menciptakan *economy*, *effeciency*, dan *effectiveness*, yang pada akhirnya akan bermuara pada kinerja organisasi. Komitmen tersebut dapat tercipta apabila individu dalam organisasi sadar akan hak dan kewajibannya dalam organisasi tanpa melihat jabatan dan kedudukan masing-masing individu, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif.

Faktor ketiga adalah gaya kepemimpinan, kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi (Bass, 1990, dalam Menon, 2002) demikian juga keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi baik yang berorientasi bisnis maupun publik, biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpin. Begitu pentingnya peran pemimpin sehingga isu mengenai pemimpin menjadi fokus yang menarik perhatian para peneliti bidang perilaku keorganisasian (Raharjo dan Nafisah 2006).

Penelitian Ambarwati, et al. (2013) menyimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah sedangkan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah. Sedangkan penelitian Taufik dan Kemala (2013) penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja sektor publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Kouzes, menunjukkan bahwa kredibilitas yang tinggi mampu menghasilkan suatu komitmen, dan hanya dengan komitmen yang tinggi, suatu perusahaan mampu menghasilkan bisnis yang baik (Kouzes, 1993: 32, Setyo Riyanto, 2002: 47) dalam Taufik dan Kemala (2013).

Penelitian ini pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati, et al. (2013), perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah terletak pada populasi penelitiannya dan penambahan variabel independen yaitu gaya kepemimpinan. Populasi penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati, et al. (2013) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, sedangkan populasi penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. Penelitian ini dilakukan di Pemda Kabupaten Grobogan karena pelayanan publik yang belum optimal serta penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang rendah, masih rendahnya pelayanan publik dikarenakan ketidakdisiplinan pegawai pemerintahan dan banyak sekali keluhan yang disampaikan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur yang belum merata

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“ANALISIS PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, KOMITMEN ORGANISASI, DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (Studi Empiris pada Instansi-Instansi dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Apakah penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintahan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja instansi pemerintahan.
2. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja instansi pemerintahan.
3. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja instansi pemerintahan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya atau bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian tentang

kinerja instansi pemerintah serta sebagai literatur untuk menambah ilmu pengetahuan.

2. Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana informasi tentang pelayanan publik yang dihasilkan dari kinerja instansi pemerintah serta dapat menambah pengetahuan akuntansi khususnya *akuntansi sektor publik* dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan.
3. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian tentang topik kinerja instansi pemerintah.
4. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menghasilkan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan teori yang digunakan untuk membahas masalah yang diangkat dalam penelitian, mencakup teori-teori dan konsep-konsep yang relevan, penelitian terdahulu yang sejenis, dan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang variabel yang digunakan dalam penelitian, pemilihan sampel, data yang diperlukan, sumber pengumpulan data, metode analisis, pengolahan data, dan pengujian hipotesis. Bab ini merupakan landasan dalam menganalisis data.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil penelitian, serta pengujian dan analisis hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan simpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan saran-saran yang mungkin dapat diajukan dan dilaksanakan untuk penelitian berikutnya.